



JANGAN ANARKISTIS

JOGJA-Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta warga Jogja untuk tidak bertindak anarkistis saat menyampaikan aspirasi.

*Luqas Subarkah, Lajeng Padmaratri, Hafit Yudi Suprobo & Catur Dwi Janati
redaksi@harianjogja.com*

Pernyataan Sultan itu disampaikan terkait dengan aksi anarkistis peserta demo di Jalan Malioboro, Kamis (8/10), untuk menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

► Halaman 11

- Sebelum kerusuhan terjadi saat demo, Sultan menggelar dialog bersama Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY terkait dengan UU Cipta Kerja.
- Pedagang mulai berkemas setelah tembakan gas air mata dilepaskan.
- Polisi berjalan di antara kendaraan operasional polisi dan DPR yang dirusak massa aksi di Gedung DPRD DIY, Kamis (8/10).



Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi meninjau kawasan pedestrian Malioboro sesuai porak-poranda ricuh di Jalan Malioboro, Kamis (8/10) malam (foto kiri). Personel DLH Kota Jogja dibantu sukarelawan membersihkan sisa-sisa aksi kaos di Malioboro (foto kanan).

Harian Jogja/Catur Dwi Janati

Janjan Anarkistis

Akibat aksi anarkistis itu satu buah restoran di samping DPRD DIY rusak, gedung DPRD DIY rusak, sejumlah kendaraan polisi dibuat bobrok, dan beberapa fasilitas umum di Malioboro juga dirusak massa.

Menurut Sultan, Jogja dengan masyarakatnya tidak pernah punya likitad untuk membangun aksi anarkistis. "Saya Hamengku Buwono X mengimbau dan berharap kepada warga, kelompok-kelompok masyarakat. Bukan karakter kita berbuat anarkistis di kotanya sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih," kata Sultan menanggapi aksi demo yang berakhir rusuh.

Sebelum adanya kerusuhan saat demo, Sultan menggelar dialog bersama Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY terkait dengan UU Cipta Kerja, di Ndalem Ageng, kompleks Kerpaitan, Jogja. Dari pertemuan tersebut, ada dua aspirasi yang akan ditindaklanjuti Sultan ke Pemerintah Pusat. "Mereka menyampaikan aspirasi supaya saya bisa memfasilitasi untuk mengirimkan surat kepada Presiden, aspirasi dari warga masyarakat khususnya buruh. Saya sanggupi dengan surat yang akan ditandatangani gubernur sebagai respons dari aspirasi mereka," ujar Sultan.

Lebih lanjut, Sultan juga menuturkan bahwa hal kedua yang menjadi pembahasan adalah soal Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang belum diterima sebagian buruh. "Demikian juga menyikapi masalah peningkatan kesejahteraan buruh lewat aktivitas koperasi yang memungkinkan bisa ditingkatkan. Inilah dua aspirasi yang bisa saya fasilitasi," ujar Sri Sultan.

Dalam pertemuan itu Sultan didampingi Sekda DIY, Kadarmanta Basukra Aji, Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, Kadisnakertans DIY, Aria Nugraha; dan Kapolda DIY, Irjen Pol Asep Suhendar.

"Hasil audiensinya Gubernur DIY akan mengirimkan pernyataan sikap MPBI DIY kepada Presiden RI yang berisi pencabutan UU Cipta Kerja," kata Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsad Ade Irawan, yang ikut pertemuan dengan Sultan.

Ia berharap tuntutan buruh terkait pencabutan UU Cipta Kerja itu bisa tercapai. "Kalau misal tidak berhasil, kami akan lakukan aksi yang lebih besar dan mogok kerja yang lebih intensif," ujarnya.

Irsad Ade Irawan mengatakan buruh di DIY juga turut serta dalam aksi mogok kerja nasional ini. Hal ini dilakukan untuk menuntut pemerintah memenuhi hak-hak buruh dan mencabut disahkannya UU Cipta Kerja. "Sementara ini kami hanya sebatas perlambatan proses produksi. Ada 20-30 perusahaan," kata Irsad.

Ditutup Sementara

Gedung DPRD DIY porak poranda usai aksi unjuk rasa yang dilakukan massa aksi pada Kamis (8/10). Kaca gedung DPRD DIY yang berada di sebelah utara banyak yang pecah. Sejumlah coretan juga terdapat tepat di depan ruang sidang paripurna

1 DPRD DIY.

Sekretaris Dewan DPRD DIY Haryanta telah mendata kerusakan yang terjadi di gedung DPRD DIY. "Kebanyakan kerusakan fisik ya, sisi utara itu kaca semua pecah dan juga pipa saluran air," ujar Haryanta.

Lebih lanjut, kerusakan yang melanda gedung DPRD DIY juga melanda pos keamanan Dewan. Lampu taman milik gedung dewan juga ikut pecah. Kaca madang Masjid DPRD tak luput terkena dampaknya hingga ikut pecah. Pagar pintu masuk maupun keluar DPRD juga terkena dampaknya.

"Berdasarkan perkiraan kami, kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kami perlu perbaikan lagi hingga cat ulang," sambung Haryanta.

Da mengatakan untuk sementara Gedung DPRD akan ditutup hingga batas waktu yang belum diketahui untuk perbaikan.

Kapolresta Jogja Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro mengatakan dalam aksi yang berujung ricuh di gedung DPRD DIY, terdapat sebanyak 900 personel yang berjaga terdiri dari polisi maupun TNI. "Situasinya meringem lihat sendiri seperti apa. Kami sudah berupaya persuasi malah ngerusak. Kita tidak tahu tujuannya apa," ujar Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro.

Polisi lanjut Wahyu, sudah berupaya mengajak massa aksi berkomunikasi. Upaya komunikasi juga sempat dilakukan oleh Wakil DPRD DIY Huda Tri Yudiana, dan anggota TNI dari Batalyon Infanteri 403.

Orang nomor satu di Polresta Jogja ini juga tidak memungkiri bahwa ada korban dari anggotanya. Namun, pihaknya belum bisa merinci secara detail. Direskrimun Polda DIY, Kombespol Burkan Rudi Satria, luka robek di kepala

Berdasarkan catatan dari kepolisian, massa dari aliansi rakyat bergerak (ARB) awalnya berjumlah sekitar 1.500 orang. Namun, massa terus bertambah menjadi sekitar 2.000 orang. Massa aksi awalnya kooperatif. Namun, di tengah jalan massa aksi kemudian menjadi anarkistis dengan bertindak melempari batu dan benda lainnya seperti kelapa, tempat sampah, hingga kayu.

"Jumlah massa pengajuan awal 1.500 orang. Tapi, kalau dilihat tadi ada tambahan bisa sekitar 2.000 orang. Awalnya dari ARB. Berawal dari situ, bergabung termasuk ada dari buruh. Berangkat dari UGM. Ini yang massa kedua yang akhirnya berbuat seperti ini," jelasnya.

45 Pendemo Ditangkap

Ribuan peserta aksi yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Jogja menolak disahkannya UU Cipta Kerja Kamis (9/10). Aksi yang berpusat di Jalan Malioboro tersebut berakhir ricuh dan gaduh. Sebanyak 45 pendemo ditangkap.

Humas ARB, Revo, menuturkan aksi ini merupakan bentuk mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'aruf. Ia melihat pemerintahan Jokowi-Ma'aruf tidak mampu menghadapi pandemi. Dalam

kesusahan yang dihadapi rakyat, buruh petani, rezim Jokowi malah mengajukan UU Cipta Kerja yang disahkan 5 Oktober lalu. "Kami menuntut hari ini (kemarin) pemerintah mencabut UU Cipta Kerja dan seluruh kerangka UU dalam Omnibus Law," ungkapnya.

Menurutnya, proses pembentukan Omnibus Law, tidak melibatkan partisipasi publik dan tidak menghiraukan gelombang penolakan dan masukan masyarakat.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yulianto, menjelaskan sejumlah kendaraan milik masyarakat dan polisi rusak dalam aksi demo di Malioboro. Selain itu, polisi juga menangkap 45 pendemo yang bertindak anarkistis.

Empat orang ditangkap dan dibawa latanas Polda ke mako Polresta di sekitar Pospol Abu Bakar Ali yang rusak, dan sebanyak 15 orang ditangkap di lantai kedua gedung DPRD DIY. Selanjutnya, di sekitar lahan parkir Abu Bakar Ali (ABA) ditangkap sebanyak 12 orang, satu orang ditangkap di Pasar Sore Pabrangan, delapan orang di sekitar Pos Polisi Teteg

PKL Tutup

Rusuh dalam demo di DPRD DIY berdampak ke aktivitas ekonomi di kawasan Malioboro. Pedagang Kaki Lima (PKL) memilih menutup usaha saat bentrokan polisi dan pendemo terjadi.

Kepala UPT Malioboro, Ekwanto secara tegas mengimbau kepada PKL, tukang becak, hingga kusir andong untuk menyingkir terlebih dahulu dari lokasi demo.

"Ini kan kami tidak bisa berbuat sesuatu kecuali mengimbau untuk mencari perlindungan masing-masing, kurang kondusif, ini ramai sudah terjadi kegaduhan yang luar biasa, lempar-lemparan, gas air mata sudah disemprotkan," ujar Ekwanto.

Dampak paling kentara adanya kericuhan ini menimpa PKL di seputaran DPRD DIY ke arah utara. Dia meminta kepada para PKL untuk tutup sementara sampai situasi dan kondisi kondusif kembali.

Tak hanya itu, zonasi dan penerapan protokol kesehatan di Malioboro juga tidak bisa dilakukan saat aksi demo berlangsung. "Teman-teman Jogoboro, untuk protokol kesehatan sudah kami *los*-kan, ini kami enggak mampu ini, kami *los*-kan semua ini," tuturnya.

Pengawas dan Penasihat Koperasi PKL Malioboro Tri Dharma, Rudiarto, sangat menyayangkan insiden yang terjadi di Malioboro. "Ya sangat disayangkan, masing-masing tidak bisa menahan diri, sehingga terjadi benturan, terpaksa anggota kami menutup dagangannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Pedagang mulai berkemas setelah tembakan gas air mata dilepaskan polisi. Dikatakan Rudiarto pandemo banyak yang berlindung di seputaran PKL. "Gas air mata di arahkan ke kerumunan massa yang berbaur dengan PKL," ujarnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005